

Disdukcapil DKI akan Nonaktifkan Lagi Seratusan Ribu NIK Tahap Kedua

JAKARTA (IM) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta terus melakukan penertiban administrasi kependudukan. Salah satu caranya dengan melakukan penonaktifan terhadap nomor induk kependudukan (NIK) warga ber-KTP DKI Jakarta yang berdomisili di daerah lain.

Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya akan kembali mengajukan penonaktifan NIK kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada awal Juni 2024. Rencananya, ada sekitar 100 ribu NIK yang akan dinonaktifkan dalam tahap kedua itu.

"Nanti juga kami insya Allah di bulan Juni akan melakukan pengajuan penonaktifan lagi ke Kemendagri. Jumlahnya sekitar 100-an ribu lah," kata Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/5).

Menurut dia, dalam tahap kedua itu sasaran NIK yang dinonaktifkan adalah warga ber-KTP DKI Jakarta yang tinggal di luar daerah.

Pasalnya, saat ini ada ratusan ribu warga ber-KTP DKI Jakarta

yang tinggal di daerah lain.

"(Penonaktifan NIK) nanti untuk mereka yang tinggal di luar DKI Jakarta. Nanti di bulan Juni. Awal-awal Juni. Kita akan lakukan 100 ribu lagi," ujar Budi.

Budi Awaluddin mencatat, ada sekira 11.337.563 warga yang tinggal di Jakarta dan akan terus bertambah dengan mobilitas penduduk yang dinamis.

Oleh karena itu, penataan kependudukan perlu dilakukan agar data de facto dan de jure di lapangan dapat sesuai dan akurat.

"Dengan luas wilayah DKI Jakarta sebesar 661,5 kilometer persegi, maka terdapat 17 jiwa dalam tiap meter perseginya. Jika hal ini tidak ditata dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakakuratan data kependudukan," kata Budi.

Sebelumnya, Disdukcapil DKI juga telah melakukan penonaktifan sekitar 49 ribu NIK warga dalam tahap pertama, pada April 2024.

Dalam tahap pertama penonaktifan itu, sasaran adalah warga yang sudah meninggal dunia dan warga di lingkungan rukun tetangga (RT) yang telah hilang akibat dampak pembangunan. ● yan

Pria Lansia Tewas di Pangkuan Sopir Angkot di Depok

DEPOK (IM) - Seorang pria lanjut usia (lansia) meninggal dunia di pangkuan sopir angkutan kota (angkot) di Jalan Tole Iskandar, Sukmajaya, Depok pada Jumat (24/5) dini hari.

Sopir angkot bernama Irwan Setiawan menjelaskan kronologis korban awalnya menaiki angkot miliknya dari Jalan Dahlia, Pancoran Mas menuju ke arah Depok Timur, Sukmajaya. Namun ditengah perjalanan tiba-tiba korban Mr X itu terjatuh dan tidak sadarkan diri.

"Korban meninggal itu dia naik angkot saya dari Jalan Dahlia menuju ke Depok Timur tiba-tiba dipergang orang ini jatuh dipangkuan saya dalam kondisi sudah nggak sadarkan diri," kata Irwan kepada wartawan.

Irwan meminta bantuan rekan sesama sopir angkot untuk mengevakuasi korban.

Dirinya pun membuat laporan polisi ke Polsek Sukmajaya.

"Langsung saya ke sebuah POM Gas, kabarin rekan yang lain untuk meminta bantuan yang lainnya. Terus saya laporan ke Polsek Sukmajaya," ujarnya.

Irwan mengatakan bahwa korban Mr X duduk di bagian depan atau tepat disampingnya.

Ja pun tidak mengetahui korban dalam keadaan sakit atau tidak.

"Duduk di depan, enggak tahu (kondisi sakit atau tidak) dia diam saja di setelah Bela Casa ini, jembatan Panus nggak sempat ngomong apa-apa dan nggak kenal," ungkapnya.

Lebih lanjut, jenazah korban dilarikan ke rumah sakit terdekat dengan unit ambulans dan kasus tersebut ditangani Polsek Sukmajaya. Belum diketahui penyebab kematian korban pria lansia tersebut. ● yan

Ahmed Zaki Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Maju di Pilkada DKI

JAKARTA (IM) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar mengklaim telah mendapat dukungan dari masyarakat meski belum ada ketetapan resmi dari petinggi partai untuk menunjuknya maju menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta. Menurut Zaki, semua kader yang sudah diberikan kepercayaan bertarung dalam kontestasi politik daerah sampai saat ini masih bekerja.

"Belum. Semua masih bekerja. Nanti tunggu DPP saja, keputusan ada di ketua umum dan DPP Partai Golkar," kata Zaki.

Adapun perihal wacana duet dengan Anies Baswedan untuk Pilkada 2024, Zaki itu enggan menanggapi lebih jauh. Eks Bupati Tangerang dua periode itu menyerahkan segala keputusan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

"Begini, serahkan kepada DPP partai masing-masing. Saya punya ketua umum, keputusan ada di ketua umum dan DPP Partai Golkar," ujar Zaki.

Dua nama lain, yakni Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa dan eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil alias

Kang Emil.

Dari ketiga nama penerima mandat, belum ada satu pun yang ditunjuk petinggi partai berlambang pohon berinang itu untuk menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta. Menurut Zaki, semua kader yang sudah diberikan kepercayaan bertarung dalam kontestasi politik daerah sampai saat ini masih bekerja.

"Belum. Semua masih bekerja. Nanti tunggu DPP saja, keputusan ada di ketua umum dan DPP Partai Golkar," kata Zaki.

Adapun perihal wacana duet dengan Anies Baswedan untuk Pilkada 2024, Zaki itu enggan menanggapi lebih jauh. Eks Bupati Tangerang dua periode itu menyerahkan segala keputusan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

"Begini, serahkan kepada DPP partai masing-masing. Saya punya ketua umum, keputusan ada di ketua umum dan DPP Partai Golkar," ujar Zaki. ● yan

FOTO: ANT



WISATA LIBUR WAISAK DI DUFAN

Pengunjung berwisata di Dufan, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Jumat (24/5). Menurut pihak pengelola Dunia Fantasi jumlah pengunjung saat liburan panjang Hari Raya Waisak hingga pukul 16.00 WIB mencapai 8.000 pengunjung.

Pemprov DKI Bakal Larang Warga Jakarta Numpang KK

Heru menduga, kemungkinan KK yang banyak dalam 1 alamat sudah ada yang pindah seperti berumah tangga atau mengontrak di tempat lain. Heru akan melihat jumlah warga Jakarta yang numpang KK dengan orang lain pada akhir tahun 2024. Hal itu dilakukan sebagai wujud komitmen Pemprov DKI agar semua tertib administrasi.

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta bakal membuat aturan satu alamat rumah satu Kepala Keluarga (KK)

demis tertib administrasi. Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya masih mengkaji

aturan tersebut sebelum diterapkan ke masyarakat.

"Ini masih dalam pengkajian. Kita masih dalam pembentukan naskah akademik nanti," kata Heru, Jumat (24/5).

Setelah ada naskah akademik, kata Heru pihaknya akan memasukkan dalam Raperda pendudukan setelah UU Nomor 2 Tahun 2024 sebagai turunan dalam pengaturan administrasi kependudukan.

Setelah masuk dalam Raperda, maka akan dikaji lagi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. "Untuk dikonsultasikan.

Tapi kita sedang mengkaji ini. Karena memang kan fenomenanya luar biasa nih. Ada sampai 20 KK, 30 KK," jelas Heru.

Heru menduga, kemungkinan KK yang banyak dalam 1 alamat sudah ada yang pindah seperti berumah tangga atau mengontrak di tempat lain. Heru akan melihat jumlah warga Jakarta yang numpang KK dengan orang lain pada akhir tahun 2024.

"Setelah itu nanti baru kita kaji, dan kita juga lakukan sosialisasi, dan kita juga mungkin bisa mengecek ke lapangan. 20 KK kita langsung lihat, apakah nyatanya seperti itu," terangnya.

"Kalau memang sebenarnya hanya dua KK, orang tua dan anaknya, yang lain numpang dan tidak tinggal di situ, kan bisa masuk program penataan lagi di tahun depan," tuturnya.

Sebelumnya, Penertiban administrasi kependudukan tidak hanya untuk warga sipil saja, tapi juga untuk aparat sipil negara (ASN) Pemprov DKI.

Hal itu dilakukan sebagai wujud komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar semua tertib administrasi.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta terus menertibkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Jakarta yang

sudah meninggal dan pindah alamat.

Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono mengatakan, ada sekira 213.000 warga Jakarta yang sudah mengurus KTP nya sesuai domisili.

"Mereka itu kena warning di data warga. Terus mereka memindahkan secara sadar. Termasuk yang 1.000-an ASN," kata Heru, Jumat (24/5).

Menurut Heru, warga Jakarta yang sudah pindah ke luar DKI mencapai 100.000 lebih dan akan terus bertambah.

Ia pun bakal kembali mengajukan penonaktifan KTP ke Kementerian Dalam Negeri sekira 100.000.

"Statusnya mereka yang tinggal di luar DKI Jakarta. Itu loh. Nanti di bulan Juni. Awal-awal Juni. Kita akan lakukan 100.000 lagi," ujar Heru.

Sebelumnya, Penertiban administrasi kependudukan tidak hanya untuk warga sipil saja, tapi juga untuk aparat sipil negara (ASN) Pemprov DKI. Hal itu dilakukan sebagai wujud komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar semua tertib administrasi.

Oleh karena itu, penataan kependudukan perlu dilakukan agar data de facto dan de jure di lapangan dapat sesuai dan akurat. ● yan

Demokrat Godok Bakal Calon Pilgub Jakarta, Anies tak Masuk Radar

JAKARTA (IM) - Partai Demokrat mengungkapkan masih menggodok sejumlah nama yang akan dijagokan maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Di antara nama eksternal yang masuk radar ialah Sudirman Said, sedangkan nama Anies Baswedan tidak turut dipertimbangkan.

Kepala Badan Komunikasi Strategi atau Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan dan mendalami nama-nama untuk calon Pilgub Jakarta. Nama-nama itu berasal dari dalam dan luar partai.

"Hari ini, Demokrat sedang mempertimbangkan nama-nama dari internal maupun dari eksternal Demokrat," kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (24/5).

Di antara beberapa nama dari internal partai yakni mantan Bupati Lebak, Iti Jayabaya, mantan Bupati Karawang, Cellia Nurrahadiana, dan anggota DPRD Jakarta, Ali Suharli.

"Kalau eksternal, kami lihat Budi Djiwandono dari

ingin rehat dari dunia politik.

"Memang saya mendapatkan undangan dari partai-partai politik, ditawarkan diminta untuk dicalonkan menjadi gubernur. Saat ini saya sedang mempertimbangkan apakah kembali atau tidak, jadi sedang mempertimbangkan," kata Anies dalam acara halal bihalal bersama Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) di Kampung Marlina, Kelurahan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Ahad (19/5).

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut merasa, saat ini, masih bimbang untuk kembali berkontestasi meraih kursi Jakarta 1. Anies tidak menyampaikan kebingungan yang dirasakannya. Meski begitu, ia menekankan, pertimbangan itu karena warga masih membutuhkannya untuk memimpin Jakarta.

"Saya lagi nimbang nih serius nimbang, kembali apa enggak ya? Kembali apa enggak? Itulah (warga masih butuh) yang sedang dipertimbangkan," ucap Anies disambut warga dengan seruan 'kembali!'. ● yan

FOTO: ANT



LATIHAN TIMNAS U-20 JELANG TURNAMEN TOULON

Pesepak bola Timnas U-20 menjalani latihan di Lapangan ABC, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (24/5). Latihan tersebut digelar jelang keberangkatan ke pemusatan latihan di Como, Italia, untuk persiapan dalam Turnamen Toulon 2024 di Prancis.